

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PENULIS

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN TABEL ILUSTRASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Teori Negara Kesatuan	27
1. Negara Kesatuan	27
2. Konsep Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia	31
B. Teori Bentuk Susunan Negara	33
1. Prinsip Negara Kesatuan	34
2. Prinsip Negara Serikat	38
C. Teori Pembentukan Daerah Otonom dalam Negara Kesatuan	41
1. Pembentukan Daerah Otonom dalam Negara Kesatuan	41
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Negara	

Kesatuan Republik Indonesia	44
a. Otonomi Daerah	45
b. Desentralisasi	48
c. Dekonsentrasi	55
d. Tugas Pembantuan	57
e. Pemekaran Daerah	59

**BAB III KEBIJAKAN PENGATURAN PEMEKARAN DAERAH
DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Kebijakan Pengaturan Pemekaran di Indonesia	60
1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda	60
2. Masa Pendudukan Jepang	61
a. Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)	63
b. Era Republik Indonesia Serikat (1949-1950)	63
c. Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1950-1966)	64
d. Era Orde Baru (1966-1998)	64
e. Era 1999- Sekarang	65
f. Era Peraturan Perundang-Undangan Terkait	65
1. Undang-Undang No. 5/1974	66
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah	68
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	69
4. Pembentukan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2007	70
5. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah	76
6. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 78	

Tahun 2007	77
3. Pemekaran Daerah	80
a. Pengertian dan Dasar Hukum Pemekaran Daerah	81
1. Syarat Administrasi	83
2. Syarat Teknis	84
3. Syarat Faktor Kewilayahan	85
4. Persetujuan Bupati	85
5. Persetujuan DPRD Kabupaten Sukabumi	86
6. Persetujuan DPRD Provinsi	86
7. Persetujuan Gubernur Jawa Barat	87
B. Profil Daerah Kabupaten Sukabumi	90
1. Potensi Wilayah Calon Kabupaten Pemekaran	93
a. Gambaran Umum Kabupaten Sukabumi (Kabupaten Induk)	93
1. Cakupan Wilayah	93
2. Geografis	94
3. Demografis	94
4. Potensi yang dimiliki	95
a) Pertanian	95
b) Pertambangan	96
c) Kelautan dan Perikanan	96
d) Pariwisata	96
b. Gambaran Umum Calon Kabupaten Sukabumi Utara	98
1. Cakupan Wilayah	98
a. Geografis	98
b. Demografis	98
c. Potensi yang dimiliki	99
1. Pertanian	99
2. Industri Kecil dan Menengah	99

3. Pertambangan	99
4. Perikanan Air Tawar	100
5. Pariwisata	100
c. Gambaran Umum Wilayah kajian Titik Ibu Kota	102
1) Kondisi Fisik	102
2) Kondisi Topografi	103
3) Kondisi Klimatologi	103
4) Kondisi Geologi dan Jenis Tanah	103
 C. Implikasi Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	 121
1. Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan	121
2. Prospek Peningkatan Perekonomian daerah pada era Global dan Desentralisasi	123
3. Prospek Peningkatan Perekonomian daerah pada era Global dan Desentralisasi	123
4. Pendapatan daerah	124
5. Perwujudan Negara Kesejahteraan Indonesia dalam Negara Demokrasi	128
6. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	131

BAB IV ANALISIS PEMEKARAN KABUPATEN SUKABUMI BERDASARKAN PP NO. 78 TAHUN 2007 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Kebijakan Pengaturan Pemekaran di Indonesia	133
1. Warisan Kolonial	133
2. Masa Pendudukan Jepang	133
3. Masa Kemerdekaan	134
1. Priode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945	134

2. Priode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948	135
3. Priode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957	135
4. Priode Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959	135
5. Priode Penetapan Presiden Nomor 18 tahun 1965	136
6. Priode Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1974	136
7. Priode Penetapan Presiden Nomor 22 tahun 1999	136
8. Priode Penetapan Presiden Nomor 32 tahun 2004	137
B. 1. Kelayakan Pemekaran Kabupaten Sukabumi menurut PP No. 78 Tahun 2007	140
a. Kabupaten Sukabumi (Induk) Mencakup 26 Kecamatan	140
b. Kabupaten Sukabumi Utara (Pemekaran) Mencakup 21 Kecamatan	141
2. Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Menurut PP No. 78 Tahun 2007	171
C. Implikasi Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	172
1. <i>Good Governance</i> : Sistem Pemerintahan yang Mengikutsertakan Rakyat	
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal	
3. <i>Back to Nature</i> : Bentuk Partisipasi Masyarakat Sipil	
4. Penggalan Potensi Sosial Budaya dan Alam: Pemberdayaan dari Dalam	
5. Pemberdayaan Masyarakat: <i>Capacity from Within,</i> <i>Pressure from Without</i>	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	175
B. Saran	176
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	